



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition

Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja

KPKNL JAKARTA I

2025

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	8
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
C. Mandat dan Peran Strategis	10
D. Transformasi Penyelesaian Permasalahan Terkait Pencapaian Kinerja	11
E. Sistematika Laporan	12

BAB 2 RENCANA KINERJA

A. Rencana Strategis	14
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
C. Pengukuran Kinerja	16
D. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026	16

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	36
C. Kinerja Lainnya	36
D. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	39

BAB 4 PENUTUP

A. Penutup	41
------------------	----

Daftar TABEL

Tabel 1 SDM Berdasarkan Golongan dan Pendidikan.....	9
Tabel 2 SDM Berdasarkan Gender	10
Tabel 3 SDM Tenaga Fungsional.....	10
Tabel 4 Sasaran Strategis dan Iku Tahun 2025.....	15
Tabel 5 Capaian Kinerja atas Sasaran Strategis Dan IKU KPKNL Jakarta I Tahun 2025.....	20
Tabel 6 Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan 2025.....	21
Tabel 7 Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan 2021 s.d. 2025.....	21
Tabel 8 Indeks Integritas 2025	22
Tabel 9 Indeks Integritas 2021 s.d. 2025	22
Tabel 10 Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang 2025	23
Tabel 11 Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang 2021 s.d. 2025	23
Tabel 12 Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara 2025	23
Tabel 13 Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara 2021 s.d. 2025.....	23
Tabel 14 Persentase Realisasi Pokok Lelang 2025	24
Tabel 15 Persentase Realisasi Pokok Lelang 2021 s.d. 2025	24
Tabel 16 Jumlah Pokok Lelang Kelas I	24
Tabel 17 Jumlah Pokok Lelang Pegadaian.....	25
Tabel 18 Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara 2025	25
Tabel 19 Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara 2021 s.d. 2025	25
Tabel 20 Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi 2025	26
Tabel 21 Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi 2021 s.d. 2025	26
Tabel 22 Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan 2025	26
Tabel 23 Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan 2021 s.d. 2025	26
Tabel 24 Persentase Evaluasi Kinerja BMN 2025	27
Tabel 25 Persentase Evaluasi Kinerja BMN 2021 s.d. 2025.....	27
Tabel 26 Perhitungan Iku Persentase Evaluasi Kinerja BMN	27
Tabel 27 Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara 2025.....	28
Tabel 28 Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara 2021 s.d. 2025.....	28
Tabel 29 Tingkat Kualitas Layanan Penilaian 2025.....	29
Tabel 30 Tingkat Kualitas Layanan Penilaian 2024 dan 2025	29
Tabel 31 Persentase Produktivitas Lelang 2025	30
Tabel 32 Persentase Produktivitas Lelang 2021 s.d. 2025	30
Tabel 33 Indeks Kualitas Kinerja Anggaran 2025	30
Tabel 34 Indeks Kualitas Kinerja Anggaran 2021 s.d. 2025	30
Tabel 35 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 2025	31
Tabel 36 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 2024 Dan 2025.....	31
Tabel 37 Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai 2025	31
Tabel 38 Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai 2021 s.d. 2025	31
Tabel 39 Indeks Penanganan Permasalahan Hukum 2025	32
Tabel 40 Indeks Penanganan Permasalahan Hukum 2021 s.d. 2025	32
Tabel 41 Komunikasi Publik Yang Efektif (PPID) 2025	32
Tabel 42 Komunikasi Publik Yang Efektif (PPID) 2020 s.d. 2025	32
Tabel 43 Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko 2025	33
Tabel 44 Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko 2021 s.d. 2025	33
Tabel 45 Formula Iku Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2025	33
Tabel 46 Formula Iku Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2025 Tiap Triwulan.....	35
Tabel 47 Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM 2025.....	35
Tabel 48 Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM 2020 S.D. 2025	35

Daftar GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi KPKNL Jakarta I	9
Gambar 2 Peta Strategi 2025.....	16
Gambar 3 Indikator Kinerja Tahun 2026	17
Gambar 4 Area Pelayanan Terpadu	38
Gambar 5 Kursi Roda	38
Gambar 6 Parkiran Khusus Wanita dan Disabilitas	38
Gambar 7 Ruang Menyusui dan Ruang Tunggu Anak	38
Gambar 8 Penghargaan dari PT Bank OCBC NISP Tbk.....	39

KATA PENGANTAR



Rofii Edy Purnomo
Kepala KPKNL Jakarta I

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Jakarta I pada Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang kepada pengguna jasa. Laporan Kinerja disusun untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Jakarta I telah menerapkan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai instrumen manajemen kinerja.

Performa KPKNL Jakarta I dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Jakarta I dengan Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini adalah berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jakarta I Tahun 2025 sebesar 114,44.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi KPKNL Jakarta I dalam mendukung pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Rofii Edy Purnomo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I Tahun 2025 merupakan bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian visi yang berpegang teguh pada visi DJKN yaitu **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, KPKNL Jakarta I mempunyai 5 misi yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Jakarta I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam menjalankan tugas, KPKNL Jakarta I menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan, negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, dan Continuously Improved*). Pada tahun 2025 terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPKNL Jakarta I dengan Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta. Secara umum pencapaian IKU pada Tahun 2025 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, terdapat 1 (satu) IKU yang berada di bawah target yaitu Persentase Realisasi Pokok Lelang.

KPKNL Jakarta I tidak akan berpuas diri dengan hasil yang telah diraih di Tahun 2025. Upaya-upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Capaian IKU yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan rencana aksi yang relevan. KPKNL Jakarta I akan terus bekerja dengan semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan Integritas, Profesional, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi dan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

DJKN



01 PENDAHULUAN

1. **LATAR BELAKANG**
2. **TUGAS FUNGSI & STRUKTUR ORGANISASI**
3. **MANDAT & PERAN STRATEGIS**
4. **TRANSFORMASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN**
5. **SISTEMATIKA**



kpknljakarta1@kemenkeu.go.id



150 991

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta. KPKNL Jakarta I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, KPKNL Jakarta I dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan secara akuntabel, efektif, dan efisien dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas menjadi prinsip utama yang menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai wujud pelaksanaan asas akuntabilitas tersebut, KPKNL Jakarta I menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya selama satu tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I Tahun 2025 menyajikan gambaran capaian kinerja dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang yang disampaikan

kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta menjadi bahan monitoring dan evaluasi kinerja sekaligus dasar dalam penyusunan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur

Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa KPKNL merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sebagai unit instansi vertikal, KPKNL melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Jakarta I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;

4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Struktur Organisasi KPKNL Jakarta I



Gambar 1 Struktur Organisasi KPKNL Jakarta I

Keterangan:

- Kepala Kantor : Rofii Edy Purnomo
- Kasubbag Umum : Yanuardhi Setyo Rachman
- Kasi Pengelolaan Kekayaan Negara : Imam Arsandi
- Kasi Piutang Negara : Edy Prastanto
- Kasi Hukum dan Informasi : Agus Yulianto
- Kasi Kepatuhan Internal : Linda Susanti

Sumber daya manusia yang ada di lingkungan KPKNL Jakarta I per tanggal 31 Desember 2025 berjumlah 35 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
S3	-	-	-	-	-
S2	-	-	5	8	13
S1/D IV	-	-	16	-	16
D III	-	1	4	-	5
SLTA/D I	-	-	1	-	1
SLTP	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-
Total	-	1	26	8	35

Tabel 1 SDM Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

2. Berdasarkan Gender

Jenis Kelamin	Golongan				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Perempuan	-	1	8	3	12
Laki-laki	-		18	5	23
Total	-	1	26	8	35

Tabel 2 SDM Berdasarkan Gender

3. Tenaga Fungsional

	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Fungsional Pelelang	5
	Fungsional Pelelang Ahli Madya	2
	Fungsional Pelelang Ahli Muda	3
	Fungsional Pelelang Ahli Pertama	0
2.	Fungsional Penilai Pemerintah	4
	Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda	2
	Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama	2
3.	Fungsional Pranata Keuangan APBN	1
	Fungsional Pranata Keuangan APBN Ahli Terampil	1
4.	Juru Sita Piutang Negara	2
5.	Pemeriksa Piutang Negara	3
Total		15

Tabel 3 SDM Tenaga Fungsional

C. Mandat dan Peran Strategis

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta I memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Jakarta I turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Jakarta I selaku *asset manager* mengemban tugas menata

manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi

diserahkan kepada PUPN. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, pengurusan piutang negara difokuskan kepada piutang negara instansi pemerintah.

3. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. KPKNL Jakarta I tidak hanya melaksanakan lelang eksekusi tetapi juga melaksanakan lelang sukarela. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat menjamin kepastian hukum. Risalah.

Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai Akta van Transport untuk kepentingan peralihan hak. Penawaran lelang secara elektronik melalui surat elektronik (email) dan internet (e-auction) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran fisik peserta lelang. E-auction dapat diterapkan pada seluruh jenis lelang, yaitu lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela. KPKNL Jakarta I diharapkan dapat berperan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap ke dalam pola pikir masyarakat, bahwa lelang adalah instrumen jual beli yang menguntungkan, sehingga berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dari pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa Bea Lelang termasuk Bea Lelang Pegadaian. Kedua penerimaan tersebut

selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

D. Transformasi Penyelesaian Permasalahan terkait

Pencapaian Kinerja

Pada pelaksanaan kegiatan, secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Tahun 2025 telah sesuai dengan yang ditargetkan dan banyak diantaranya mencapai nilai di atas 100%. Meskipun pada pencapaian target tersebut dapat beberapa persoalan/ permasalahan utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dimaksud antara lain:

1. Belum ada kekuatan hukum terhadap Satuan Kerja (Satker) yang melakukan pemanfaatan BMN tanpa melalui persetujuan Pengelola Barang.
2. Minimnya kesadaran Satker terkait tertib administrasi dan terkait pengoptimalan Barang Milik Negara (BMN).
3. Kondisi perekonomian masih dalam keadaan yang tertekan, marketability dan barang yang dilelang memiliki masalah hukum.
4. Hasil lelang hak tanggungan, lelang Harta Pailit dan lelang sitaan Pengadilan sebagian besar tidak ada penawaran karena obyek lelang tidak marketabel, obyek lelang masih dihuni oleh debitur/pemilik jaminan/pihak lain, nilai limit tinggi dan kurang peminat.
5. Masih adanya keraguan pembeli lelang untuk membeli melalui lelang.
6. Dokumen kepemilikan tanah Satker yang menjadi objek sertifikasi belum lengkap.
7. Terdapat BMN berupa tanah yang masih dalam sengketa.
8. Sebagian besar piutang negara tidak didukung barang jaminan dan alamat debitur tidak sesuai dengan alamat penyerahan, sehingga keberadaanya sulit diketahui dan

perusahaan sudah dipailitkan dan dilikuidasi.

9. Terdapat barang jaminan / harta kekayaan lain yang sudah berkali-kali lelang tetapi tidak laku sehingga menyebabkan tidak terselesaikannya pengurusan piutang negara.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai permasalahan yang dihadapi, dilakukan transformasi penyelesaian permasalahan melalui penguatan tata kelola, peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Satuan Kerja. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan, tertib administrasi, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan Barang Milik Negara.

Selain itu, dilakukan penyesuaian strategi dalam pelaksanaan lelang dan pengurusan piutang negara melalui peningkatan kualitas pra-lelang, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan media digital, serta penguatan transparansi dan kepastian hukum guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan marketability objek lelang dan efektivitas penyelesaian piutang negara.

Transformasi tersebut juga didukung dengan percepatan penyelesaian permasalahan data dan legalitas BMN melalui inventarisasi, verifikasi, dan koordinasi intensif dengan instansi terkait. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan hambatan yang ada dapat diminimalkan dan pencapaian kinerja ke depan dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis, serta sistematika laporan.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang ringkasan penetapan/perjanjian kinerja, metode yang digunakan dalam mengukur kinerja tahun 2025 serta adendum kinerja.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja beserta analisisnya dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan uraian atas realisasi anggaran yang digunakan.
4. Bab IV Penutup
Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

DJKN



02 RENCANA KINERJA

- 1. RENCANA STRATEGIS**
- 2. PENYUSUNAN PK TAHUN 2025**
- 3. PENGUKURAN KINERJA**
- 4. PENYUSUNAN RENCANA KERJA 2026**



kpknljakarta1@kemenkeu.go.id



150 991

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar, disusun secara integral, efisien, dan koordinatif, serta mengikuti alur pikir yang sistematis. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2020-2024, perencanaan strategis dirancang melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu, dengan memperhatikan potensi, peluang, serta kendala yang mungkin timbul.

Penyusunan Renstra DJKN dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Renstra DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis serta berorientasi pada pencapaian kondisi masa depan yang diharapkan dan dapat dicapai.

Sejalan dengan hal tersebut, Visi dan misi KPKNL Jakarta I disusun selaras dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Berdasarkan visi dan misi tersebut, KPKNL Jakarta I menetapkan tujuan strategis dalam Rencana Strategis KPKNL Jakarta I Tahun 2020-2024 sebagai berikut

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberikan manfaat finansial dan sosial;
2. Mewujudkan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;

3. Mewujudkan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, KPKNL Jakarta IV melaksanakan berbagai program, antara lain:

- Sosialisasi peraturan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan lelang kepada seluruh satuan kerja binaan KPKNL Jakarta I;
- Pelaksanaan e-Rekon dengan satuan kerja terkait dalam rangka rekonsiliasi BMN yang dilakukan secara sistematis;
- Peningkatan penagihan piutang negara secara intensif;
- Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi terhadap lelang sebagai sarana penjualan yang menghasilkan harga optimal;
- Peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa dengan berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP), khususnya SOP Layanan Unggulan;
- Pengusulan pegawai KPKNL Jakarta I untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan/Perjanjian Kinerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal, visi dan misi KPKNL Jakarta I

menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis (SS) sebagaimana tertuang dalam Peta Kinerja Nomor PK-01/WKN.07/2025.

Sasaran Strategis KPKNL Jakarta I Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta I. Peta Strategi KPKNL Jakarta I Tahun 2025 memuat 8 Sasaran Strategis yaitu:

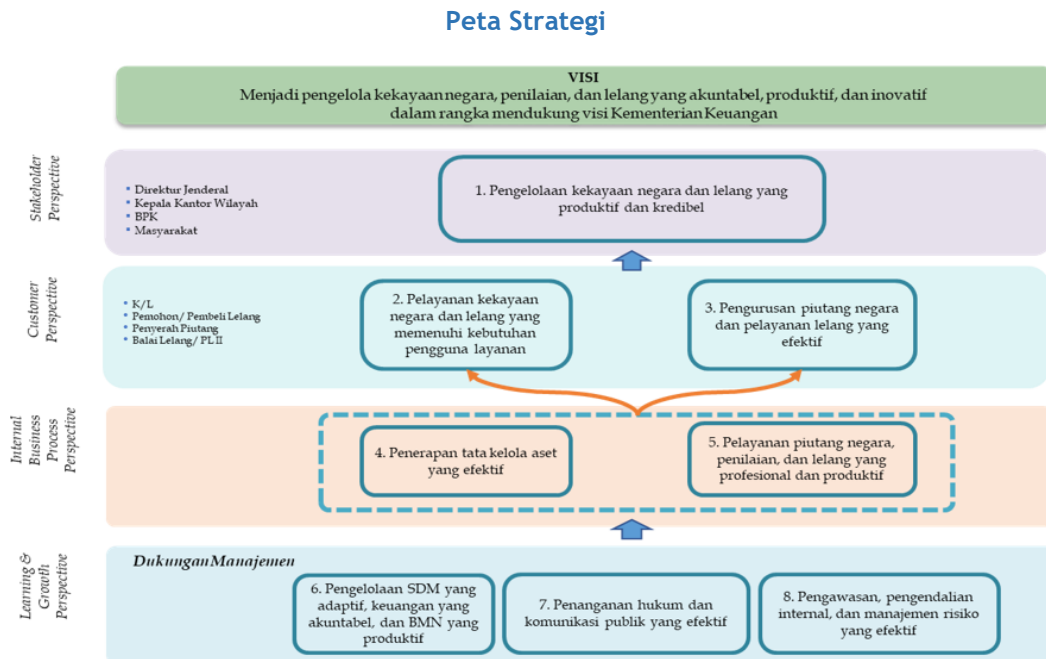
1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya.
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
4. Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif.
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif.
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif.
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif.

Dari peta strategi KPKNL Jakarta I tahun 2025 tersebut untuk mencapai 8 Sasaran Strategis telah diidentifikasi sebanyak 19 Indikator Kinerja Individu. Rincian tentang Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100
		1b-CP	Indeks Integritas	100
		1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80
		8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100

Tabel 4 Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2025

Peta strategi KPKNL Jakarta I mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*.



Gambar 2 Peta Strategi 2025

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja, KPKNL Jakarta I berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lain.
3. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target.
4. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:

- Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%.
- Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

D. PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

Proses penyusunan substansi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 telah mempertimbangkan amanat yang tercantum dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra), prioritas nasional, serta Rencana Kerja dan Anggaran (Renja/RKA) Tahun 2026.

Secara umum Rencana Kinerja Tahun 2026 tetap berpedoman pada peta strategis tahun sebelumnya namun terdapat beberapa indikator kinerja yang disesuaikan sebagaimana rincian berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
2.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektifitas pembinaan	80%
3.	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja Lelang	100%
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6.	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi SDM	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-CP	Indeks integritas organisasi	100%
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Gambar 3 Indikator Kinerja Tahun 2026

Pada tahun 2026, KPKNL Jakarta I akan menetapkan rencana kerja yang mengarah kebijakan strategis yang berfokus pada pencapaian visi menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif. Rencana kinerja ini dijabarkan ke dalam 8 Sasaran Strategis (SS) yang saling terintegrasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Produktif dan Kredibel

Fokus pada dampak akhir bagi pemangku kepentingan melalui: Indeks kepuasan pengguna layanan, dan Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

2. Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Layanan

Menitikberatkan pada kualitas data dan pembinaan dengan indikator persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah dan tingkat efektifitas pembinaan.

3. Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Efektif

Mendorong efektivitas operasional melalui persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara dan persentase realisasi kinerja lelang.

4. Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

Mengoptimalkan aspek legalitas dan pengelolaan aset lewat tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara, persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan, dan persentase evaluasi kinerja BMN.

5. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

Menjamin profesionalisme layanan teknis melalui persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara, tingkat kualitas layanan penilaian, dan persentase produktivitas lelang.

6. Pengelolaan SDM yang Adaptif, Keuangan yang Akuntabel, dan BMN yang Produktif

Memperkuat fondasi internal organisasi dengan persentase pengembangan kompetensi SDM, indeks kualitas kinerja anggaran, indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan.

7. Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

Menjaga reputasi dan kepastian hukum melalui Indeks efektivitas komunikasi publik, indeks penanganan permasalahan hukum,

8. Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif

Memastikan tata kelola organisasi yang bersih lewat indeks integritas organisasi dan indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko.

DJKN



03 AKUNTABILITAS KINERJA

- 1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
- 2. REALISASI ANGGARAN**
- 3. KINERJA LAINNYA**
- 4. EVALUASI PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA**



kpknljakarta1@kemenkeu.go.id



150 991

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Rincian capaian kinerja atas 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja (IKU) KPKNL Jakarta I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks	
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100	120	120
		1b-CP	Indeks Integritas	100	105,29	105,29
		1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	109,67	109,67
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100	112,71	112,71
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	99,50	99,50
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100	102,26	102,26
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	98,30	132,83
4	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100	112,50	101,68
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100	110	110
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100	135,50	135,50
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	122,91	175,58
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80	107,30	134,13
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80	96,86	121,07
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	113,65	113,65
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	118	147,50
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	98,87	123,59
		8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100	129,93	129,93

Tabel 5 Capaian Kinerja atas Sasaran Strategis dan IKU KPKNL Jakarta I Tahun 2025

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya

a. Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

K-Wide	SS. 1 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya							
	1. Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	53,85%	92,31%	92,31%	92,31%	92,31%	120,00%	120,00%	
Capaian	269,25%	184,62%	184,62%	131,87%	131,87%	120,00%	120,00%	

Tabel 6 Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan 2025

T/R	Tahun 2021-2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	N/A	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	106,40%	112,19%	120%
Capaian	N/A	106,40%	112,19%	120%

Tabel 7 Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan 2021 s.d. 2025

Pengukuran IKU ini baru dilaksanakan mulai tahun 2023. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan *stakeholders*. Dalam menyelenggarakan survei, untuk menjamin independensi, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) serta penyelesaian rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

Dibandingkan tahun 2024, terdapat perbedaan komponen perhitungan pada IKU ini. Tahun 2024

hanya menetapkan 3 komponen perhitungan yaitu Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK), Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL), dan Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2023, sementara pada tahun 2025 juga terdiri dari 3 komponen, yaitu:

- Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK)
- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
- Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024.

KPKNL Jakarta I telah melakukan beberapa langkah diantaranya menyampaikan daftar responden sesuai kriteria ke Sekretariat Direktorat Jenderal (Sesditjen), publikasi dan sosialisasi standar pelayanan pada berbagai saluran serta melaksanakan internalisasi terkait *service excellent*.

b. Indeks Integritas

K-Wide	SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	2. Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	120	120	120	120	105,29	105,29	
Capaian	100%	120%	120%	120%	120%	105,29%	105,29%	

Tabel 8 Indeks Integritas 2025

T/R	Tahun 2021-2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	N/A	88,67	89,17	100
Realisasi	N/A	89,17	92,44	105,29
Capaian	N/A	100,56%	103,67%	105,29%

Tabel 9 Indeks Integritas 2021 s.d. 2025

Pengukuran IKU ini dimulai sejak tahun 2023. Realisasi IKU Indeks Integritas Tahun 2025 adalah 105,29 dengan persentase capaian sebesar 105,29. Pencapaian IKU Indeks Integritas terdiri atas 2 formula dari :

1. Triwulan I s.d. III

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun Sebelumnya (target Q1 s.d. Q3 = 100%)
Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi sesuai dengan rencana aksi hasil SPI.

Formula =

Pelaksanaan TL rencana aksi hasil SPI dengan formula = Akumulasi realisasi kegiatan s.d. triwulan tersebut / Akumulasi jumlah rencana kegiatan rencana aksi s.d. triwulan tersebut

Max capaian 120% untuk TW I s.d. III

Keterangan:

Rencana Aksi Perbaikan Hasil SPI

- Merupakan tindak lanjut atas rencana aksi yang disusun oleh UKI bersama dengan Inspektorat Mitra atas hasil SPI Tahun 2024 dan disupervisi oleh Inspektorat VII
- Penilaian dilakukan atas persentase penyelesaian Tindak Lanjut
- Inspektorat Mitra dihimbau untuk mengawal kualitas penyusunan rencana aksi

2. Triwulan IV

Indeks Integritas Murni + Apresiasi (5 poin)

Indeks Integritas Murni = Indeks Internal (45%) + Eksternal (45%) + FGD (10%) - Faktor Koreksi (20%)

Faktor Koreksi = OTT/Fraud (40% x skor) + Audit Investigasi APH dan IBI (30% x skor) + Pengondisian oleh UEI (20% x skor) + Informasi APH (10% x skor)

Apresiasi = Realisasi TL SPI (2,5 poin) + Pencegahan/Respon (2,5 poin)

Penilaian Pencegahan = Realisasi Kegiatan Respon (audit investigasi dilakukan oleh UKI) + Persentase realisasi kegiatan internalisasi + Kesesuaian topik kegiatan internalisasi + Penyerapan pesan kegiatan internalisasi (harus pimpinan tertinggi).

c. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

K-Wide	SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	3. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	120	120	120	120	105,29	105,29	
Capaian	100%	120%	120%	120%	120%	105,29%	105,29%	

Tabel 10 Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang 2025

T/R	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	100% (Rp80.035.000.000)	100% (Rp89.122.000.000 kemudian terdapat adendum sehingga target menjadi Rp91.622.000.000)	100% (Rp131.820.038.927)	100% (Rp. 116.500.000.000)	100% (Rp. 125.763.205.000)
Realisasi	147,73% (Rp118.231.592.390)	179,41% (Rp180.314.391.844,50)	129,08% (131.820.038.927)	110,39% (Rp. 128.601.714.975)	109,67% (Rp. 137.921.116.113,24)
Capaian	147,73%	179,41%	129,08%	147,73%	179,41%

Tabel 11 Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang 2021 s.d. 2025

Realisasi IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 137.921.116.113,24. IKU ini mulai diukur kinerjanya pada tahun 2017. Realisasi tersebut didapat dari :

1. Realisasi nominal PNPB Aset sebesar Rp. 94.584.750.000,00
2. Realisasi nominal PNPB PN sebesar Rp. 6.578.455.000,00
3. Realisasi nominal PNPB Lelang sebesar Rp. 24.600.000.000,00

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

1. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

K-Wide	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara Negara dan Lelang yang optimal							
	4. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	200%	203%	203%	140,89%	140,89%	112,71%	112,71%	
Capaian	200%	203%	203%	140,89%	140,89%	112,71%	112,71%	

Tabel 12 Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara 2025

T/R	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	112,71%
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	112,71%

Tabel 13 Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara 2021 s.d. 2025

Perhitungan pencapaian IKU ini pada tahun 2025 terdiri atas :

- Tahap Pengujian NUP BMN Target
- Tahap Perhitungan Optimalisasi
- Tahap Perhitungan Capaian Optimalisasi BMN

Tingkat Optimalisasi Pengelaaan BMN = $\frac{[(\text{Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme penggunaan}) + (\text{Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme pemanfaatan})/3] \times 100\%}{}$

2. Persentase Realisasi Pokok Lelang

K-Wide	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal							
	5. Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100% Rp.31M	100% Rp.217M	100% Rp.217M	100% Rp.401,96M	100% Rp.401,96M	100% Rp.619,91M	100% Rp.619,91M	Max/TLK
Realisasi	271,01% Rp.84M	98,71% Rp.214,19M	98,71% Rp.214,19M	99,74% Rp.401,96M	99,74% Rp.401,96M	99,50% Rp.616,91M	99,50% Rp.616,91M	
Capaian	271,01%	98,71%	98,71%	99,74%	99,74%	99,50%	99,50%	

Tabel 14 Persentase Realisasi Pokok Lelang 2025

T/R	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	121,95%	148,52%	72,20%	91,23%	99,50%
Capaian	121,95%	148,52%	72,20%	91,23%	99,50%

Tabel 15 Persentase Realisasi Pokok Lelang 2021 s.d. 2025

Realisasi Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang) pada tahun 2025 adalah 99,50%. Pencapaian tersebut lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. IKU Realisasi Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang) merupakan gabungan dari Target/realisasi pokok lelang kelas I dan Target/realisasi pokok lelang pegadaian. Perhitungan pencapaian IKU ini pada tahun 2025 menggunakan formula:

$$\frac{\sum \text{Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II}}{\text{Target Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II}}$$

Adapun rincian pencapaian sub-sub IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Pokok Lelang Kelas I

T/R	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	Rp383.000.000.000	Rp388.000.000.000	Rp390.000.000.000	Rp. 420.300.000.000	Rp. 496.000.000.000
Realisasi	Rp416.604.964.000	Rp576.539.889.492	Rp229.301.640.834	Rp. 387.184.572.491	Rp. 489.986.538.668
Capaian	109%	148,59%	58,79%	92,12%	98,79%

Tabel 16 Jumlah Pokok Lelang Kelas I

Realisasi Jumlah Pokok Lelang Kelas I pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.489.986.538.668 atau tidak melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.496.000.000.000.

2) Jumlah Pokok Lelang Pegadaian

T/R	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	Rp94.000.000.000	Rp80.000.000.000	Rp. 80.000.000.000	Rp. 150.000.000.000	Rp. 124.000.000.000
Realisasi	Rp165.080.089.000	Rp118.551.458.600	Rp. 110.058.048.300	Rp. 133.127.707.100	Rp. 126.930.515.400
Capaian	176%	148,19%	137,57%	88,75%	102,36%

Tabel 17 Jumlah Pokok Lelang Pegadaian

Realisasi Jumlah Pokok Lelang Pegadaian pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.126.930.515.400. Pencapaian tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 124.000.000.000.

3. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

K-Wide	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal							
	6. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100% Rp.77,5M	100% Rp.155M	100% Rp.155M	100% Rp.232,5M	100% Rp.232,5M	100% Rp.400,8M	100% Rp.400,8M	Max/TLK
Realisasi	140,33% Rp.108,7M	266% Rp.412,3 M	266% Rp.412,3 M	173,12% Rp.402,5M	173,12% Rp.402,5M	102,02% Rp.409,9M	102,02% Rp.409,9M	
Capaian	140,33%	266%	266%	173,12%	173,12%	102,02%	102,02%	

Tabel 18 Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara 2025

T/R	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	Rp261.983.673.163,57	Rp341.159.212.641,00 kemudian terdapat adendum sehingga target menjadi Rp512.000.000.000,00	Rp345.000.000.000	Rp. 450.000.000.000 dan terdapat adendum sehingga menjadi Rp. 697.460.000.000	Rp. 348.300.000.000 dan terdapat adendum sehingga menjadi Rp. 400.873.986.000
Realisasi	Rp485.564.042.443,12	Rp 698.862.787.052,95	Rp723.854.222.707	Rp 764.471.984.032,15	Rp 409.938.402.166
Capaian	185,34%	136,50%	209,81%	109,61%	102,02%

Tabel 19 Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara 2021 s.d. 2025

IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara baru diukur di tahun 2020. Pada tahun 2025, IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKN (nilai saldo piutang negara).

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PND/ Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)

atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)

2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
5. Keringanan Utang yang dilunasi tahun berjalan,
6. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL, termasuk didalamnya

apabila ada penyelesaian piutang negara melalui *asset debt swap*.

3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

a. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

K-Wide	SS.3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	7. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	100	96,33	
Capaian	122,26%	125%	125%	112,45%	112,45%	128,44%	128,44%	

Tabel 20 Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi 2025

T/R	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	N/A	N/A	N/A	75	74
Realisasi	N/A	N/A	N/A	96,33	98,30
Capaian	N/A	N/A	N/A	128,44%	132,83%

Tabel 21 Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi 2021 s.d. 2025

Pengukuran IKU ini baru ditetapkan pada tahun 2024. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi terdiri dari 2 komponen antara lain:

- Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang
- Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara

4. Penerapan tata kelola aset yang efektif

a. Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan

K-Wide	SS.4 Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	8. Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	7,76%	48,93%	48,93%	60,32%	60,32%	112,50%	112,50%	
Capaian	155,29%	122,33%	122,33%	100,54%	100,54%	112,50%	112,50%	

Tabel 22 Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan 2025

T/R	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	45,45%	100%	111,15%	101,68%	112,50%
Capaian	45,45%	100%	111,15%	101,68%	112,50%

Tabel 23 Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan 2021 s.d. 2025

Pengukuran IKU ini TA 2025 yaitu pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang *clean and clear* (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang *not clean but clear* (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang *not clean and*

not clear (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4). Perhitungan pencapaian IKU ini pada tahun 2025 menggunakan formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{output K1} + \text{K2} + \text{K3} + \text{K4}}{\sum \text{target sertifikasi}} \times 100\%$$

b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN

K-Wide	SS.4 Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	9. Persentase Evaluasi Kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	80%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	22,57%	86,87%	86,87%	120%	120%	110%	110%	
Capaian	150,45%	173,75%	173,75%	160%	160%	110%	110%	

Tabel 24 Persentase Evaluasi Kinerja BMN 2025

T/R	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	100% (157 NUP)	100%	100%	100%	100%
Realisasi	103,82% (163 NUP)	103,82%	143,37%	122,99%	110%
Capaian	103,82%	103,82%	143,37%	122,99%	110%

Tabel 25 Persentase Evaluasi Kinerja BMN 2021 s.d. 2025

Perhitungan pencapaian IKU ini pada tahun 2025 menggunakan formula:

Komponen	Formula	Satuan
Komponen A (maksimal 120%) =	(Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya/	NUP
	Jumlah target aset yang akan dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya)	
Komponen B (maksimal 120%) =	(Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker/	NUP
	Jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker)	
Capaian = (Komponen A x 50%) + (Komponen B x 50%)		
Komponen A memiliki target penyelesaian sebesar 100% , sementara itu Komponen B memiliki target penyelesaian sebesar 5% dari target komponen A		

Tabel 26 Perhitungan IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN

5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

a. Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

K-Wide	SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	10. Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	155%	125,63%	125,63%	108,75%	108,75%	135,50%	135,50%	
Capaian	155%	125,63%	125,63%	108,75%	108,75%	135,50%	135,50%	

Tabel 27 Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara 2025

T/R	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	33 BKP	40 BKP	50 BKP terdapat Addendum menjadi 51 BKP	60 BKP terdapat Addendum menjadi 73 BKP	40 BKP
Realisasi	71 BKP	75 BKP	61 BKP	79 BKP	48 BKP
Capaian	215,15%	187,50%	119,61%	101,68%	135,50%

Tabel 28 Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara 2021 s.d. 2025

IKU Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara mulai diukur pada tahun 2020. Sebelumnya IKU ini merupakan komponen perhitungan untuk IKU Persentase hasil pengurusan piutang negara. IKU Persentase Penyelesaian BKP menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKP.

Pada tahun 2025, Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)
 - Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
 - Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
 - Koreksi Data (Berkas piutang

Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).

2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1)
 - Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
 - Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen :

- 1)
- Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
 - Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);

Target di 2025 sejumlah 40 Berkas Piutang Negara Diselesaikan berasal dari

Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara dan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara.

Realisasi Jumlah BKPN yang Dapat Diselesaikan pada tahun 2025 sebanyak 48 BKPN dari target 40 BKPN. Persentase capaian mencapai 135,50%.

b. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

K-Wide	SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	11. Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/TLK
Realisasi	107,94%	105,91%	105,91%	103,84%	103,84%	122,91%	122,91%	
Capaian	154,20%	151,30%	151,30%	148,35%	148,35%	175,58%	175,58%	

Tabel 29 Tingkat Kualitas Layanan Penilaian 2025

T/R	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	N/A	70%
Realisasi	N/A	122,91%
Capaian	N/A	175,58%

Tabel 30 Tingkat Kualitas Layanan Penilaian 2024 dan 2025

Pengukuran IKU ini TA 2025 terdiri atas 3 indikator sebagai berikut:

- a. Indikator Penilaian yang Akuntabel & Profesional
- b. Akurasi Data Layanan Penilaian
- c. Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian

Perhitungan pencapaian IKU ini pada tahun 2025 menggunakan formula:

$$40\% \times \text{Capaian Norma Waktu Layanan Penilaian} + (30\% \times \text{Akurasi Data Layanan Penilaian}) + (30\% \times \text{Nilai Hasil Kaji Ulang})$$

c. Persentase Produktivitas Lelang

K-Wide	SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	12. Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	PoI/KP

Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	41,24%	80,58%	80,58%	104,06%	104,06%	107,30%	107,30%	
Capaian	137,45%	201,46%	201,46%	148,65%	148,65%	134,13%	134,13%	

Tabel 31 Persentase Produktivitas Lelang 2025

T/R	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	35%	36%	80%	89%	80%
Realisasi	39,41%	45,47%	131,25%	89,66%	107,30%
Capaian	112,61%	126,31%	164,06%	100,74%	134,13%

Tabel 32 Persentase Produktivitas Lelang 2021 s.d. 2025

Realisasi IKU Presentase produktivitas lelang pada tahun 2025 adalah 107,30% dengan persentase capaian sebesar 134,13%. Capaian tersebut lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80%. Perhitungan pencapaian IKU ini pada tahun 2025 menggunakan formula:

$$\left(\left(\frac{\sum (\text{Target } \% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}}{\text{Jumlah Jenis Lelang yang dilaksanakan}} \right) \times 40\% \right) + \left(\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \right) \times 60\% \right)$$

6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

a. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

K-Wide	SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	13 Indeks Kualitas Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 33 Indeks Kualitas Kinerja Anggaran 2025

T/R	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	95,5%	95,5%	100	100%	100%
Realisasi	94,48%	95,28%	113,33	120%	120%
Capaian	98,93%	99,77%	113,33%	120%	120%

Tabel 34 Indeks Kualitas Kinerja Anggaran 2021 s.d. 2025

Realisasi Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar 120 dari target sebesar 100 sehingga capaiannya adalah sebesar 120% telah melampaui dari target yang ditetapkan.

b. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa

K-Wide	SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	14 Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	PoI/KP

Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	160%	110%	110%	110%	110%	120%	120%	
Capaian	160%	110%	110%	110%	110%	120%	120%	

Tabel 35 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa 2025

T/R	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	N/A	100%
Realisasi	N/A	120%
Capaian	N/A	120%

Tabel 36 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa 2024 dan 2025

IKU ini mengukur komponen berikut:

- Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri); dan
- Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

c. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

K-Wide	SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	15 Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	27,56%	62,89%	62,89%	78,94%	78,94%	96,86%	96,86%	
Capaian	137,78%	157,22%	157,22%	131,57%	131,57%	121,07%	121,07%	

Tabel 37 Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai 2025

T/R	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	100%	100%	100%	90%	80%
Realisasi	120%	120%	120%	113,50	96,86
Capaian	120%	120%	120%	126,11%	121,07%

Tabel 38 Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai 2021 s.d. 2025

IKU Persentase Pengembangan Potensi Pegawai ini mengukur dua komponen yaitu Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai dan Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan.

7. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

K-Wide	SS.7 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	16 Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK

Realisasi	111,99%	112,01%	113,61%	113,61%	113,61%	113,65%	113,65%
Capaian	111,99%	112,01%	113,61%	113,61%	113,61%	113,65%	113,65%

Tabel 39 Indeks Penanganan Permasalahan Hukum 2025

T/R	Tahun 2021- 2024	Tahun 2025
Target	N/A	100%
Realisasi	N/A	113,65%
Capaian	N/A	113,65%

Tabel 40 Indeks Penanganan Permasalahan Hukum 2021 s.d. 2025

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan
- b. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%).

b. Komunikasi Publik Yang Efektif (PPID)

K-Wide	SS.7 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
17 Komunikasi publik yang efektif (PPID)								
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	118	118	118	118	118	118	118	
Capaian	147,50%	147,50%	147,50%	147,50%	147,50%	147,50%	147,50%	

Tabel 41 Komunikasi Publik Yang Efektif (PPID) 2025

T/R	Tahun 2020- 2023***	2024	Tahun 2025
Target	N/A	80	80
Realisasi	N/A	116	118
Capaian	N/A	145%	147,50%

Tabel 42 Komunikasi Publik Yang Efektif (PPID) 2020 s.d. 2025

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

***)Pengukuran IKU ini baru dilakukan pada tahun 2024. Target untuk KPKNL Jakarta I untuk IKU ini pada Tahun 2025 adalah sebesar 80, dapat direalisasikan dengan nilai 118, dan nilai capaian 147,50% di atas target.

8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

a. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko

K-Wide	SS.8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	18 Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	98,95%	99,24%	99,24%	98,50%	98,50%	98,87%	98,87%	
Capaian	123,69%	124,06%	124,06%	123,06%	123,06%	123,59%	123,59%	

Tabel 43 Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko 2025

T/R	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	75	80	80	85	80
Realisasi	95,43	99,17	97,20	99,33	98,87
Capaian	127,24%	123,96%	121,50%	116,86%	123,59%

Tabel 44 Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko 2021 s.d. 2025

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko bertujuan untuk Mengukur kualitas kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKM. Formula IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko Tahun 2025 sebagai berikut :

No	Komponen	Pembobotan Capaian Tahunan	Trajectory	Nilai IKMR
1	Bagian I	20%	Triwulan I	Nilai Bagian I x 100%
2	Bagian II	25%	Triwulan II	(Nilai Bagian I x 20%/45%) + (Nilai Bagian II x 25%/45%)
3	Bagian III	25%	Triwulan III	(Nilai Bagian I x 20%/70%) + (Nilai Bagian II x 25%/70%) + (Nilai Bagian III x 25%/70%)
4	Bagian IV	30%	Triwulan IV	Sama dengan perhitungan Tahunan
Formula Realisasi IKU untuk:			Nilai IKMR (Realisasi IKU)	
1) Pimpinan Unit			(Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi X 30%) + (Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai X 30%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)	

Tabel 45 Formula IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2025

	TW I	TW II	TW III	TW IV
	Bagian I (20%)	Bagian II (25%)	Bagian III (25%)	Bagian IV (30%)
Manajemen Kinerja Organisasi	1) Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan Kinerja Organisasi	1) Ketepatan Waktu Penyelesaian Reviu K3 TW I	1) Ketepatan Waktu Penyelesaian Reviu K3 TW II	1) Ketepatan Waktu Penyelesaian Reviu K3 TW III
	2) Kualitas Dokumen Perencanaan Kinerja Organisasi	2) Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Kinerja Organisasi TW I	2) Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Kinerja Organisasi TW II	2) Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Kinerja Organisasi TW III
	3) Kesesuaian Manual IKU Pimpinan Unit	3) Kualitas Laporan Kinerja TW I	3) Kualitas Laporan Kinerja TW II	3) Kualitas Laporan Kinerja TW III
				4) Edukasi Manajemen Kinerja Organisasi
Manajemen Kinerja Pegawai	1) Kelengkapan SKP unit	1) Kualitas penyusunan manual IKI dan SKP Komplemen TW II	1) Kelengkapan SKP Komplemen TW II	1) Kelengkapan SKP Komplemen TW III
	2) Kepatuhan penilaian perilaku TW I	2) Kepatuhan penilaian perilaku TW II	2) Kepatuhan penilaian perilaku TW III	2) Kepatuhan penilaian perilaku TW IV
	3) Kepatuhan pelaksanaan DKI di bawah pimpinan unit TW I	3) Kepatuhan penyusunan IPR TW I	3) Kepatuhan penyusunan IPR TW II	3) Kepatuhan penyusunan IPR TW III dan Pelaksanaan DKI di bawah pimpinan unit TW IV
		4) Pelaksanaan DKI di bawah pimpinan unit TW II	4) Pelaksanaan DKI di bawah pimpinan unit TW III	4) Edukasi Manajemen Kinerja Pegawai
				5) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai
Manajemen Risiko	1) Penyusunan Profil dan Piagam Risiko	1) Kualitas Laporan	1) Kualitas Laporan	1) Kualitas Laporan

		Pemantauan TW I	Pemantauan TW II	Pemantauan TW III
	2) Dokumen penyusunan Profil Risiko dan Piagam Manajemen Risiko	2) Ketepatan Waktu Penyampaian LPR TW I	2) Ketepatan Waktu Penyampaian LPR TW II	2) Ketepatan Waktu Penyampaian LPR TW III
				3) Edukasi Manajemen Risiko
				4) Kapasitas Pengelola Risiko

Tabel 46 Formula IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2025 tiap Triwulan

b. Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM

K-Wide	SS.8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	19 Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	129,93	129,93	
Capaian	100	100	100	100	100	129,93	129,93	

Tabel 47 Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM 2025

T/R	Tahun 2020- 2024	Tahun 2025
Target	N/A	100
Realisasi	N/A	129,93
Capaian	-	129,93%

Tabel 48 Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM 2020 s.d. 2025

IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM ini mengukur 4 (empat) komponen yaitu :

- 1 Indeks Komponen I : Implementasi Keberlanjutan Program ZI dapat terlihat dari ketersediaan dokumen mulai dari minimal 1 tahun sebelumnya (Y-1) s.d Q1 tahun penilaian berlangsung (Y).
- 2 Indeks Komponen II: Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian.
- 3 Indeks Komponen III: Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Paparan Field Evaluation.
- 4 Indeks Komponen IV : Nilai LKE x Koefisien Tingkat Monev ZI) + Faktor Apresiasi/Koreksi.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung seluruh operasional dan pencapaian target strategis organisasi, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I telah mengelola sumber daya keuangan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025. Alokasi anggaran ini merupakan instrumen vital dalam membiayai berbagai kegiatan layanan mulai dari pengelolaan kekayaan negara, penilaian, hingga pelaksanaan lelang di wilayah Jakarta I.

1. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Pelaksanaan

Berdasarkan data keuangan akhir tahun, total pagu anggaran yang dialokasikan untuk KPKNL Jakarta I adalah sebesar Rp2.142.177.000,00. Dari ketersediaan pagu tersebut, organisasi berhasil mencatatkan realisasi belanja sebesar Rp2.079.641.306,00. Secara persentase, capaian realisasi ini mencapai 97,08%, yang mengindikasikan bahwa penyerapan anggaran telah dilakukan secara optimal dan proporsional sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah disusun di awal tahun. Sisa anggaran yang tidak terealisasi merupakan hasil dari upaya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

2. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pencapaian angka 97,08% ini tidak hanya sekadar mencerminkan kemampuan penyerapan, namun juga menjadi indikator kuat dalam penilaian Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tingginya angka realisasi tersebut menunjukkan:

- Ketepatan Perencanaan: Kesesuaian antara rencana kegiatan dengan

realisasi di lapangan berjalan sangat baik.

- Kepatuhan Regulasi: Seluruh proses pengadaan dan pembayaran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan dalam mempertahankan realisasi di atas 95% menunjukkan komitmen KPKNL Jakarta I dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Dukungan finansial yang terserap secara efektif ini terbukti menjadi pendorong utama bagi tercapainya sasaran strategis instansi, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada publik dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNPB).

C. KINERJA LAINNYA

1. Parameter Gender Equality, Disability, and Sociaik Inclusion (GEDSI)

KPKNL Jakarta I memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan lingkungan kerja dan pelayanan publik yang inklusif serta berkeadilan. Meskipun dari total 35 orang pegawai terdapat distribusi gender yang didominasi oleh laki-laki (23 laki-laki dan 12 perempuan), organisasi menjamin bahwa prinsip kesetaraan tidak dibatasi oleh angka, melainkan diwujudkan melalui kebijakan strategis dan penyediaan fasilitas yang merata. Langkah-langkah konkret yang telah diimplementasikan oleh KPKNL Jakarta I meliputi:

a. Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam sistem organisasi, KPKNL Jakarta

I telah membentuk Tim Kerja Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Tim ini berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan dan penyusunan program kerja telah mempertimbangkan aspek keadilan bagi seluruh pegawai tanpa membedakan latar belakang gender.

b. Pembinaan Mental dan Karakter yang Inklusif

Selaras dengan KMK Nomor 467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Jakarta I menerapkan pola bintal yang komprehensif pada empat bidang utama: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan. Salah satu bentuk implementasi nyatanya adalah penyelenggaraan Kajian Bintal Muslimah yang berkolaborasi dengan Kanwil DJKN DKI Jakarta. Program ini bertujuan menciptakan SDM yang beriman, bertakwa, dan sehat secara mental. Selain itu, kegiatan edukatif seperti Internalisasi PUG, *Sharing* Buku PUG, dan Refreshment PUG rutin dilaksanakan untuk mengikis bias gender di lingkungan kerja.

c. Kesetaraan Peluang Karier dan Kompetensi

KPKNL Jakarta I menerapkan sistem meritocracy yang inklusif, di mana pegawai perempuan diberikan kesempatan yang sepenuhnya setara untuk mengakses pelatihan pengembangan kompetensi maupun akselerasi karier. Tidak ada batasan atau "langit-langit kaca" (*glass ceiling*) bagi pegawai perempuan untuk menempati posisi strategis,

sejauh memiliki performa dan kompetensi yang sesuai.

d. Modernisasi Fasilitas Ramah Disabilitas dan Gender

Untuk memberikan pelayanan yang berkeadilan bagi masyarakat (*Social Inclusion*), Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Jakarta I telah dilengkapi dengan sarana prasarana yang mendukung kelompok rentan dan disabilitas, antara lain:

- Aksesibilitas Fisik: Penyediaan jalan pemandu (*guiding block*) bagi tunanetra, ketersediaan kursi roda, serta area parkir khusus bagi wanita dan penyandang disabilitas yang terletak dekat dengan pintu utama.
- Ruang Ramah Keluarga: Tersedianya ruang menyusui (laktasi) yang higienis serta ruang tunggu anak yang nyaman untuk mendukung pengunjung yang membawa balita.
- Layanan Prioritas: Penerapan standar prosedur yang mendahului penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil guna memastikan kenyamanan dalam menerima layanan kekayaan negara dan lelang.

Dengan mengintegrasikan hal-hal tersebut, KPKNL Jakarta I tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga membangun budaya organisasi yang empati dan responsif terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat maupun pegawai.



Gambar 4 Area Pelayanan Terpadu



Gambar 6 Parkiran Khusus Wanita dan Disabilitas



Gambar 7 Ruang Menyusui dan Ruang Tunggu Anak



Gambar 5 Kursi Roda

2. Penghargaan pada KPKNL Jakarta I



Gambar 8 Penghargaan dari PT Bank OCBC NISP Tbk

Pada Tahun 2025, KPKNL Jakarta I memperoleh penghargaan dari PT Bank

OCBC NISP Tbk, Regional Retail Collection & Recovery V Jakarta 2. Penghargaan tersebut diberikan pada tanggal 25 Maret 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama yang baik dan kontribusi KPKNL Jakarta I dalam mendukung pelaksanaan kegiatan lelang. Pemberian penghargaan ini menjadi pengakuan atas sinergi yang efektif antara KPKNL Jakarta I dan pihak perbankan dalam penyelenggaraan lelang yang profesional, transparan, dan akuntabel.

D. EVALUASI PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dari sisi kinerja organisasi, KPKNL Jakarta I berhasil melampaui berbagai target strategis yang telah ditetapkan. Beberapa capaian signifikan terlihat pada Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan yang mencapai angka 120, serta Indeks Integritas yang berada pada posisi 105,29. Selain itu, efektivitas pelayanan teknis juga menunjukkan hasil positif, di mana realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara mencapai 135,50 dan tingkat kualitas layanan penilaian berada pada angka 122,91 dari target awal.

Dari sisi anggaran, pengelolaan keuangan selama tahun 2025 dilakukan secara akuntabel dengan total pagu sebesar Rp2.142.177.000,00. Dari jumlah tersebut, organisasi berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp2.079.641.306,00 atau mencapai persentase 97,08%. Penyerapan ini mendukung tercapainya Indeks Kualitas Kinerja Anggaran serta Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang masing-masing tercatat pada angka 120 dari target 100.

Pada aspek sosial dan inklusi (GEDSI), akuntabilitas diwujudkan melalui kebijakan lingkungan kerja dan fasilitas layanan yang berkeadilan. Dengan komposisi pegawai sebanyak 35 orang yang terdiri dari 12 perempuan dan 23 laki-laki, organisasi memastikan adanya kesetaraan dalam pengembangan kompetensi, yang terbukti dari realisasi indeks kompetensi pegawai sebesar 129,93. Di sisi pelayanan publik, aksesibilitas bagi masyarakat dipenuhi melalui penyediaan sarana fisik di Area Pelayanan Terpadu (APT), seperti kursi roda, jalur pemandu disabilitas, area parkir khusus wanita dan disabilitas, serta ruang laktasi dan ruang tunggu anak.

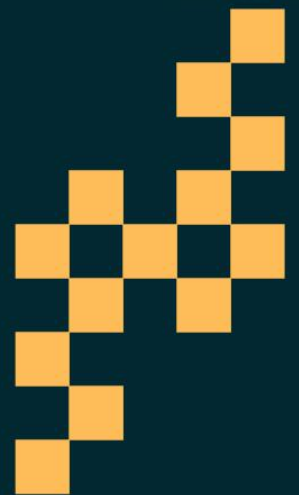
Sebagai rencana keberlanjutan untuk tahun 2026, organisasi akan melakukan penajaman pada indikator kinerja dengan mengarahkan fokus misalnya pada akurasi data IGT peta BMN dan efektivitas pembinaan pengguna layanan. Selain itu, terdapat reposisi indikator indeks integritas ke dalam sasaran pengawasan dan manajemen risiko guna memperkuat akuntabilitas internal organisasi secara menyeluruh.

Ke depan diharapkan agar penguatan akuntabilitas kinerja dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Melalui optimalisasi capaian yang telah diraih, diharapkan KPKNL Jakarta I dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola kekayaan negara serta memberikan pelayanan publik yang semakin transparan, inklusif, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

DJKN



04 PENUTUP



kpknljakarta1@kemenkeu.go.id



150 991

A. PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN serta upaya peningkatan *good governance*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Pada Tahun 2025 tugas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, lelang dan penilaian semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, jajaran KPKNL Jakarta I senantiasa berusaha menghadapi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian IKU secara keseluruhan pada Tahun 2025 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat 1 (satu) IKU yang realisasinya belum mencapai target yang ditentukan.

Langkah-langkah strategi yang akan dilakukan KPKNL Jakarta I dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Dalam Pengelolaan Kekayaan Negara:
 - Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap persetujuan pengelolaan BMN yang ditertibkan oleh KPKNL Jakarta I selaku Pengelola Barang.
 - Menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian periodik secara tepat waktu.
2. Dalam Penerimaan Piutang Negara
 - Melakukan penggalan potensi penerimaan dari Piutang Negara

sehingga outstanding Piutang Negara dapat ditekan.

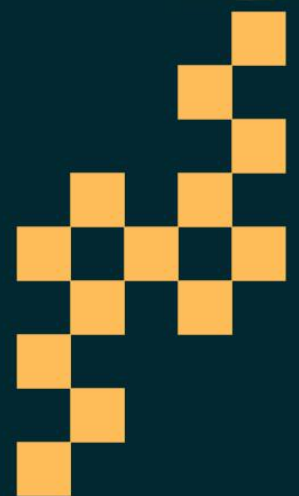
- Melakukan penelitian lapangan untuk mencari keberadaan dan tracing aset dalam upaya pengoptimalan pengurusan Piutang Negara.
3. Dalam Pelayanan Lelang
 - Melakukan penggalan potensi lelang, termasuk lelang UMKM.
 - Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* lelang untuk mengoptimalkan pelaksanaan AYDA.
 4. Dalam Pelayanan Penilaian
 - Berkoordinasi dengan unit-unit terkait dalam pelaksanaan penilaian.
 - Menerapkan manajemen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penilaian sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan penilaian dapat tepat waktu.
 5. Dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM):
 - Melakukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara efektif.
 - Meningkatkan kualitas SDM agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi pengguna jasa.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta I, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

DJKN



LAMPIRAN



kpknljakarta1@kemenkeu.go.id



150 991

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1/WKN.07/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA I
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalND]

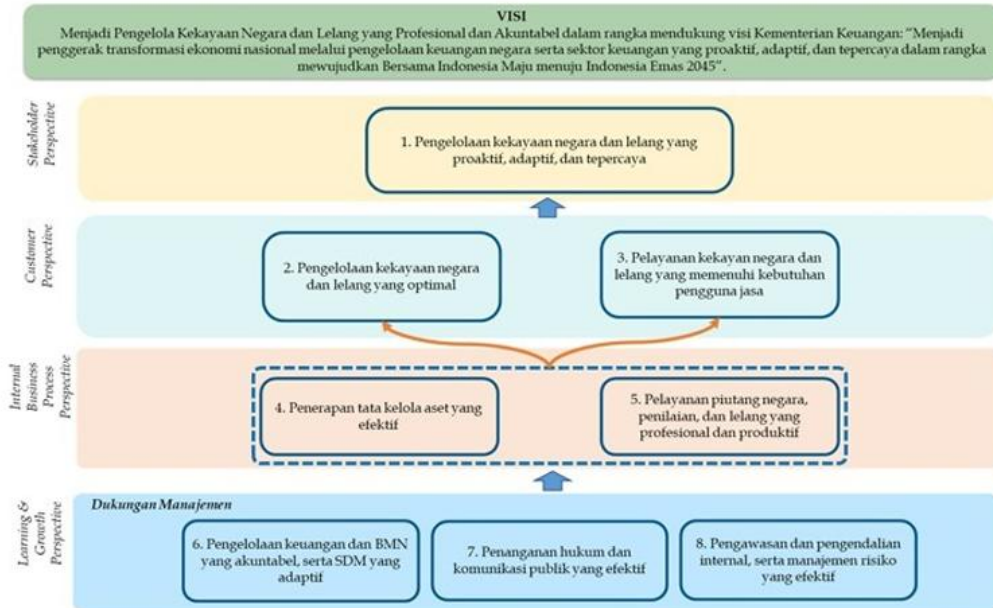


Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA I
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp. 125,7 M)
		1b-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1c-CP Indeks integritas	100
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp. 620 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp. 348,3 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5b-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalND]



Program/Kegiatan 2025	Anggaran
Program: Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp787,565,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi	Rp18,748,000
2. Pengelolaan Aset	Rp768,817,000
Program: Dukungan Manajemen	Rp1,598,545,000
Kegiatan	
1. Legalisasi dan Litigasi	Rp64,420,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp1,507,517,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp4,080,000
4. Pengelolaan Risiko dan Pengawasan Internal	Rp22,528,000

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara DKI Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta I



Ditandatangani Secara Elektronik
Rofii Edy Purnomo

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA I
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp. 125,7 M)
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp. 620 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp. 348,3 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5b-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jakarta I



Ditandatangani Secara Elektronik
Rofii Edy Purnomo



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I



Ditandatangani Secara Elektronik
Rofii Edy Purnomo

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Rofii Edy Purnomo		NAMA	Dodok Dwi Handoko
NIP	19710410 199703 1 003		NIP	19750815 199503 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp. 125,7 M)	Penerima Layanan
		Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp. 620 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp. 348,3 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalND]



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalND]



PERILAKU KERJA	
5	Loyal
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



Jakarta, 30 Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono
19710912 199703 1 001



Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo
19710410 199703 1 003

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN		PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025						
DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	39 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp. 125,7 M)
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp. 620 M)

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalND]



2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp. 348,3 M)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5b-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalND]



	8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									

Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Arif Bintarto Yuwono
19710912 199703 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

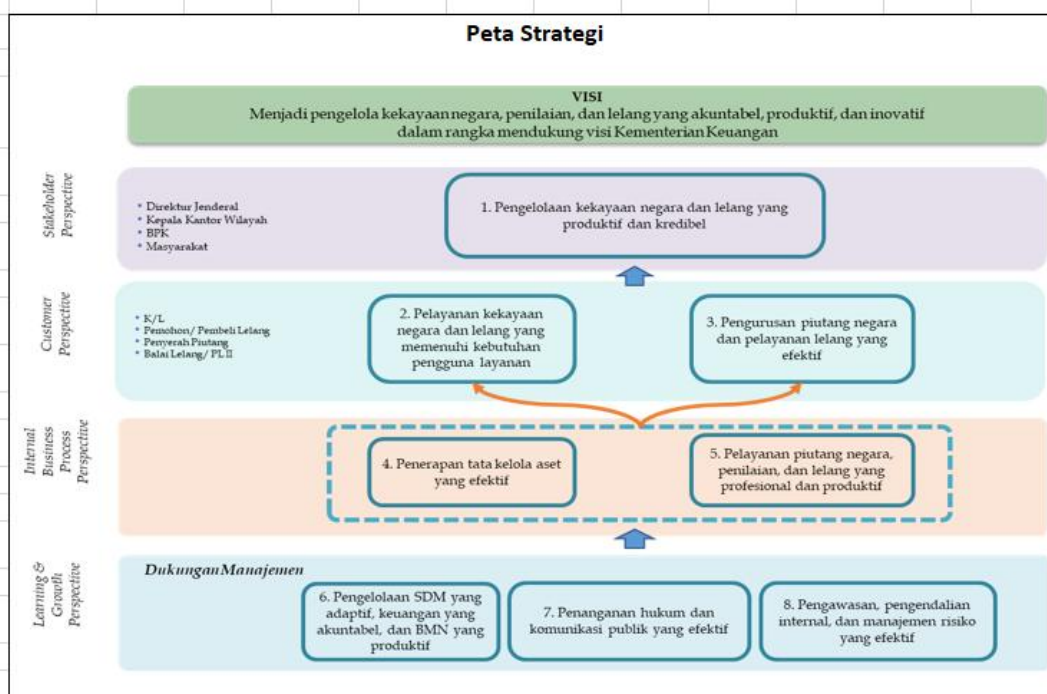
Rofii Edy Purnomo
19710410 199703 1 003

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN 2

RENCANA KINERJA TAHUN 2026



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
2.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektifitas pembinaan	80%
3.	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja Lelang	100%
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6.	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi SDM	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-CP	Indeks integritas organisasi	100%
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

LAMPIRAN 3
CAPAIAN INDEKS KINERJA ANGGARAN TAHUN 2025

A. Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran

Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
A) Nilai IKPA (Bobot 50%)			100,00
1. Revisi DIPA	100,00	10	10,00
2. Deviasi Hal III DIPA	100,00	15	15,00
3. Penyerapan Anggaran	100,00	20	20,00
4. Belanja Kontraktual	0,00	0	
5. Penyelesaian Tagihan	0,00	0	
6. Pengelolaan UP dan TUP	100,00	10	10,00
7. Dispensasi SPM	0,00	0	
8. Capaian Output	100,00	25	25,00
B) Nilai SMART (Bobot 50%)			100,00
1. Efektivitas	100,00	75	75,00
2. Efisiensi	100,00	25	25,00
Nilai Kinerja Anggaran s.d. Triwulan - IV			100,00
Target IKU IKA			95,00
Indeks Capaian Kinerja IKU IKA Triwulan - IV			120,00

LAMPIRAN 4
RINCIAN KERTAS KERJA ANGGARAN TAHUN 2026

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
UNIT KERJA (537721) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
ALOKASI Rp. 2,805,548,000

Halaman: 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015.09.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko			1,215,299,000	
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi			65,910,000	
4796.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	175.0 orang, kegiatan		65,910,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT				
4796.AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	45.0 orang		17,410,000	
100	Tidak Ada Komponen			17,410,000	U
A	Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD di Bidang Piutang Negara			17,410,000	
521211	Belanja Bahan			17,410,000	PNP
	(KPPN.019-JAKARTAI)				
	- KDM - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 5 FREK]	200.0 OK	57,000	11,400,000	SBM
	- KDM - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 5 FREK]	200.0 OK	24,000	4,800,000	SBM
	- CTK - Backdrop dan bahan rapat	1.0 THN	1,210,000	1,210,000	
4796.AEF.003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	60.0 orang		23,340,000	
100	Tidak Ada Komponen			23,340,000	U
A	Forum Group Discussion dengan Praktisi, Akademisi, dan Penegak Hukum			23,340,000	
521211	Belanja Bahan			23,340,000	PNP
	(KPPN.019-JAKARTAI)				
	- KDM - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [65 ORG x 4 FREK]	260.0 OK	57,000	14,820,000	SBM
	- KDM - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [65 ORG x 4 FREK]	260.0 OK	24,000	6,240,000	SBM
	- CTK - Backdrop dan bahan rapat	1.0 THN	2,280,000	2,280,000	
4796.AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	70.0 orang		25,160,000	
100	Tidak Ada Komponen			25,160,000	U
A	Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD di Bidang Barang Milik Negara			25,160,000	
521211	Belanja Bahan			25,160,000	RM
	(KPPN.019-JAKARTAI)				
	- KDM - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [60 ORG x 5 FREK]	300.0 OK	57,000	17,100,000	SBM
	- KDM - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [60 ORG x 5 FREK]	300.0 OK	24,000	7,200,000	SBM
	- CTK - Backdrop dan bahan rapat	1.0 THN	860,000	860,000	
4798	Pengelolaan Aset			1,149,389,000	
4798.AAH	Peraturan lainnya[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	315.0 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan		555,327,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT				
4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	275.0 Surat Keputusan		233,745,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			233,745,000	U
A	Penelitian Awal dan Pemberian Rekomendasi Lingkup KPKNL			233,745,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
 UNIT KERJA (537721) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
 ALOKASI Rp. 2,805,548,000

Halaman: 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.019-JAKARTAII) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [3 ORG x 2 HARI x 33 FREK] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) [3 ORG x 1 HARI x 43 FREK] - Transportasi [3 ORG x 20 FREK]	198.0 OH 129.0 OH 60.0 OK	420,228 735,000 376,250	200,595,000 83,205,000 94,815,000 22,575,000	RM SBM RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.019-JAKARTAII) - Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [3 ORG x 5 HARI x 13 FREK]	195.0 OK	170,000	33,150,000 33,150,000	RM SBM
4798.AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	40.0 Surat Keputusan		321,582,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			321,582,000	U
A	Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara			321,582,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.019-JAKARTAII) - Biaya Pertanahan (SKPT, Sita, Blokir) - Biaya Iklan Pengumuman Lelang dan Panggilan Debitur - Biaya Kemenkumham	1.0 THN 1.0 FREK 1.0 THN	1,500,000 42,642,000 1,500,000	45,642,000 1,500,000 42,642,000 1,500,000	A * * *
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.019-JAKARTAII) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [3 ORG x 3 HARI x 24 FREK] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) [3 ORG x 2 HR x 24 FREK] - Transportasi [3 ORG x 24 FREK]	216.0 OH 144.0 OH 72.0 OK	430,000 735,000 350,000	223,920,000 92,880,000 105,840,000 25,200,000	A * * *
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.019-JAKARTAII) - Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [3 ORG x 2 HARI x 51 FREK]	306.0 OK	170,000	52,020,000 52,020,000	A * SBM
4798.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan[Program Baru - Perubahan Kebijakan] Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT	400.0	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	36,418,000	
4798.ABA.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	369.0	Rekomendasi Kebijakan	28,293,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			28,293,000	U
A	Implementasi Evaluasi Portofolio Aset			28,293,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.019-JAKARTAII) - CTK - Penjilidan dan penggandaan bahan	1.0 THN	363,000	363,000 363,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
 UNIT KERJA (537721) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
 ALOKASI Rp. 2.805,548,000

Halaman: 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.019-JAKARTAII) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [3 ORG x 2 HR x 4 FREK] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon - IV/Golongan III (JAWA BARAT) [3 ORG x 1 HR x 4 FREK] - Transportasi [3 ORG x 4 FREK]	24.0 OH 12.0 OH 12.0 OK	430,000 735,000 350,000	23,340,000 10,320,000 8,820,000 4,200,000	RM SBM SBM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.019-JAKARTAII) Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam - Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [3 ORG x 3 HARI x 3 FREK]	27.0 OK	170,000	4,590,000	RM SBM
4798.ABA.003	Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	31.0 Rekomendasi Kebijakan		8,125,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK			8,125,000 8,125,000	U
521211	Belanja Bahan (KPPN.019-JAKARTAII) - CTK - Penjilidan dan penggandaan bahan	1.0 THN	250,000	250,000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.019-JAKARTAII) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [3 ORG x 1 HR x 2 FREK] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon - IV/Golongan III (JAWA BARAT) [3 ORG x 1 HR x 1 FREK] - Transportasi [3 ORG x 1 FREK]	6.0 OH 3.0 OH 3.0 OK	430,000 735,000 350,000	5,835,000 2,580,000 2,205,000 1,050,000	RM SBM SBM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.019-JAKARTAII) Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam - Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [3 ORG x 2 HR x 2 FREK]	12.0 OK	170,000	2,040,000 2,040,000	RM SBM
4798.BAH	Pelayanan Publik Lainnya[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	700.0 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik		268,287,000	
4798.BAH.001	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT Risalah Lelang	500.0 dokumen		48,912,000	
100	Tidak Ada Komponen Bimbingan Teknis/Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Lelang			48,912,000 48,912,000	U
521211	Belanja Bahan (KPPN.019-JAKARTAII) - CTK - Penjilidan dan penggandaan bahan	1.0 TAHUN	912,000	912,000	PNP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
 UNIT KERJA (537721) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
 ALOKASI Rp. 2,805,548,000

Halaman: 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.019-JAKARTAII) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [2 ORG x 3 HR x 4 FREK] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon - IV/Golongan III (JAWA BARAT) [2 ORG x 2 HR x 4 FREK] - Transportasi [2 ORG x 4 FREK]	24.0 OH 16.0 OH 8.0 OK	430,000 735,000 350,000	24,880,000 10,320,000 11,760,000 2,800,000	A * * *	PNP SBM SBM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.019-JAKARTAII) - Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [2 ORG x 1 HARI x 68 FREK]	136.0 OK	170,000	23,120,000 23,120,000	A *	PNP SBM
4798.BAH.002	Laporan Penilaian	200.0 dokumen		219,375,000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			219,375,000	U	
A	Survey Lapangan dan Penilaian			219,375,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.019-JAKARTAII) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [2 ORG x 1 HR x 79 FREK] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon - IV/Golongan III (JAWA BARAT) [5 ORG x 3 HR x 7 FREK] - Transportasi [2 ORG x 2 HR x 13 FREK]	158.0 OH 105.0 OH 52.0 OK	428,640 735,000 353,366	67,725,000 77,175,000 18,375,000		SBM SBM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.019-JAKARTAII) - Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [5 ORG x 6 HR x 11 FREK]	330.0 OK	170,000	56,100,000 56,100,000		RM SBM
4798.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Program Baru - Perubahan Kebijakan] Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT	991.0 Laporan, Rekomendasi		289,357,000		
4798.FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	2.0 Rekomendasi		22,238,000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			22,238,000	U	
A	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN Kewenangan KPKNL			22,238,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.019-JAKARTAII) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [3 ORG x 1 HARI x 5 FREK] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon - IV/Golongan III (JAWA BARAT) [2 ORG x 1 HR x 4 FREK] - Transportasi [2 ORG x 4 FREK]	15.0 OH 8.0 OH 8.0 OK	430,000 689,125 328,125	6,450,000 5,513,000 2,625,000		SBM SBM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.019-JAKARTAII) - Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [3 ORG x 1 HARI x 15 FREK]	45.0 OK	170,000	7,650,000 7,650,000		RM SBM
4798.FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	1.0 Rekomendasi		7,666,000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			7,666,000	U	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
 UNIT KERJA (537721) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
 ALOKASI Rp. 2,805,548,000

Halaman: 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Survey Basis Data			2,040,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.019-JAKARTAII)			2,040,000	RM
	- Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [3 ORG x 2 HR x 2 FREK]	12.0 OK	170,000	2,040,000	SBM
B	Penyusunan DKPB			3,331,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.019-JAKARTAII)			271,000	RM
	- Penggandaan, Penjilidan	1.0 THN	271,000	271,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.019-JAKARTAII)			3,060,000	RM
	- Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [3 ORG x 3 HR x 2 FREK]	18.0 OK	170,000	3,060,000	SBM
C	Penyusunan DKPS			2,295,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.019-JAKARTAII)			2,295,000	RM
	- Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [2 ORG x 7 FREK]	14.0 OK	163,929	2,295,000	SBM
4798.FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	1.0 Rekomendasi		207,270,000	
100	Tidak Ada Komponen			207,270,000	U
A	Penggalian potensi lelang kepada Stakeholder			207,270,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.019-JAKARTAII)			139,950,000	A PNP
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [3 ORG x 3 HR x 15 FREK]	135.0 OH	430,000	58,050,000	* SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) [3 ORG x 2 HR x 15 FREK]	90.0 OH	735,000	66,150,000	* SBM
	- Transportasi [3 ORG x 15 FREK]	45.0 OK	350,000	15,750,000	* SBM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.019-JAKARTAII)			67,320,000	A PNP
	- Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [3 ORG x 2 HR x 66 FREK]	396.0 OK	170,000	67,320,000	* SBM
4798.FAE.301	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipatkan (PU)	987.0 Rekomendasi		52,183,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			52,183,000	U
A	Koordinasi dengan Kantor Pertanahan (Kantah) dan K/L			52,183,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.019-JAKARTAII)			6,973,000	RM
	- CTK - Backdrop dan bahan rapat	1.0 THN	169,000	169,000	
	- KDM - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [21 ORG x 4 FREK]	84.0 OK	57,000	4,788,000	SBM
	- KDM - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [21 ORG x 4 FREK]	84.0 OK	24,000	2,016,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
 UNIT KERJA (537721) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
 ALOKASI Rp. 2,805,548,000

Halaman: 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.019-JAKARTAII) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [3 ORG x 2 HR x 6 FREK] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) [3 ORG x 1 HR x 6 FREK] - Transportasi [3 ORG x 6 FREK]	36.0 OH 18.0 OH 18.0 OK	430,000 735,000 350,000	35,010,000 15,480,000 13,230,000 6,300,000	RM SBM SBM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.019-JAKARTAII) - Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [3 ORG x 2 HR x 10 FREK]	60.0 OK	170,000	10,200,000 10,200,000	RM SBM
015.09.WA 4700	Program Dukungan Manajemen Legislasi dan Litigasi			1,590,249,000 64,420,000	
4700.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	14.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		64,420,000	
4700.EBA.969	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT Layanan Bantuan Hukum	14.0 Layanan		64,420,000	
100	Tidak Ada Komponen			64,420,000	U
A	Pelaksanaan Advokasi Hukum			64,420,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.019-JAKARTAII) - Biaya beracara	1.0 TAHUN	2,580,000	2,580,000	A PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.019-JAKARTAII) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [2 ORG x 1 HR x 10 FREK] - Transportasi [2 ORG x 10 FREK]	20.0 OH 20.0 OK	430,000 350,000	15,600,000 8,600,000 7,000,000	A PNP * SBM *
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.019-JAKARTAII) - Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [2 ORG x 2 HARI x 68 FREK]	272.0 OK	170,000	46,240,000 46,240,000	A PNP * SBM
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			1,499,774,000	
4701.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	24.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		1,436,574,000	
4701.EBA.002	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT Kerumahtanggaan	12.0 Layanan		113,113,000	
100	Tidak Ada Komponen			113,113,000	U
A	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan			113,113,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
 UNIT KERJA (537721) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
 ALOKASI Rp. 2,805,548,000

Halaman: 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan (KPPN.019-JAKARTAI I) - KDM - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [45 ORG x 6 FREK] - KDM - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [45 ORG x 6 FREK] - CTK - Backdrop dan penggantian bahan rapat	270.0 OK 270.0 OK 1.0 TAHUN	57,000 24,000 693,000	22,563,000 15,390,000 6,480,000 693,000	RM SBM SBM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.019-JAKARTAI I) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [3 ORG x 4 HR x 6 FREK] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) [3 ORG x 3 HR x 6 FREK] - Transportasi [3 ORG x 6 FREK]	72.0 OH 54.0 OH 18.0 OK	430,000 735,000 350,000	76,950,000 30,960,000 39,690,000 6,300,000	RM SBM SBM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.019-JAKARTAI I) - Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [2 ORG x 2 HARI x 20 FREK]	80.0 OK	170,000	13,600,000 13,600,000	RM SBM
4701.EBA.994	Layanan Perkantoran	12.0 Layanan		1,323,461,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,323,461,000	U
A	Pembayaran Biaya Operasional Kantor			1,104,593,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.019-JAKARTAI I) > Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran - keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (DKI Jakarta) >> Honorarium Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam Pengemudi - Honorarium Satpam dan Pengemudi D.K.I. Jakarta [1 ORG x 13 BLN] - Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti D.K.I. Jakarta [6 ORG x 13 BLN] > Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Kerja, Pakaian Kerja Pengemudi Petugas - Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (D.K.I. Jakarta) [37 ORG x 2 STEL] - Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (D.K.I. Jakarta) [7 ORG x 2 STEL]	1.0 STKR 13.0 OB 78.0 OB 74.0 STEL 14.0 STEL	58,627,000 0 6,000,000 5,500,000 878,825 738,000	640,992,000 565,627,000 58,627,000 507,000,000 78,000,000 429,000,000 75,365,000 65,033,000 10,332,000	RM SBM SBM SBM SBM SBM
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (KPPN.019-JAKARTAI I) - Penambah Daya Tahan Tubuh (DKI Jakarta) [37 ORG x 60 HR]	2220.0 OH	13,050	28,971,000 28,971,000	RM SBM
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.019-JAKARTAI I) - Belanja Pengiriman Surat	1.0 THN	22,250,000	22,250,000 22,250,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
 UNIT KERJA (537721) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
 ALOKASI Rp. 2,805,548,000

Halaman 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.019-JAKARTAII)			117,240,000	RM
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,180,000	14,160,000	SBM
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,150,000	13,800,000	SBM
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	470,000	5,640,000	SBM
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	410,000	4,920,000	SBM
	- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) [3 ORG x 12 BLN]	36.0 OB	300,000	10,800,000	SBM
	- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	540,000	6,480,000	SBM
	- Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	440,000	5,280,000	SBM
	- Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) [7 ORG x 12 BLN]	84.0 OB	330,000	27,720,000	SBM
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	680,000	8,160,000	SBM
	- Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang [3 ORG x 12 BLN]	36.0 OB	180,000	6,480,000	SBM
	- Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	200,000	2,400,000	SBM
	- Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	200,000	2,400,000	SBM
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000	SBM
	- Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) [4 ORG x 12 BLN]	48.0 OB	150,000	7,200,000	SBM
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.019-JAKARTAII)			55,500,000	RM
	- Obat - Obat dan Cek Kesehatan [37 ORG]	37.0 OK	1,500,000	55,500,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.019-JAKARTAII)			239,640,000	RM
	- ATK - Alat Tulis Kantor	1.0 THN	138,000,000	138,000,000	
	- ATK - Persediaan Komputer	1.0 THN	101,640,000	101,640,000	
B	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			114,106,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
 UNIT KERJA (537721) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
 ALOKASI Rp. 2,805,548,000

Halaman: 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.019-JAKARTAII)			114,106,000	RM
	- Pemeliharaan AC Split	4.0 UNIT	946,750	3,787,000	SBM
	- Pemeliharaan CCTV	2.0 UNIT	1,960,000	3,920,000	
	- Pemeliharaan Roll Opek	1.0 UNIT	980,000	980,000	
	- Pemeliharaan Facsimile	2.0 UNIT	490,000	980,000	
	- Pemeliharaan Mesin Fotocopy Electronic	3.0 UNIT	1,176,000	3,528,000	
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	37.0 PEG	78,406	2,901,000	SBM
	- Pemeliharaan Lemari Besi/Metal	38.0 UNIT	98,000	3,724,000	
	- Pemeliharaan Alat Penghancur Kertas	3.0 UNIT	98,000	294,000	
	- Pemeliharaan Tabung Pemadam Api	5.0 UNIT	294,000	1,470,000	
	- Pemeliharaan Televisi	4.0 UNIT	294,000	1,176,000	
	- Pemeliharaan LCD Projector/Infocus	2.0 UNIT	490,000	980,000	
	- Pemeliharaan Rak Besi	218.0 UNIT	49,000	10,682,000	
	- Pemeliharaan Filing Cabinet Besi	33.0 UNIT	49,000	1,617,000	
	- Pemeliharaan Brandkas	14.0 UNIT	49,000	686,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (D.K.I. Jakarta)	2.0 UNIT	37,000,000	72,520,000	SBM
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (D.K.I. Jakarta)	1.0 UNIT	4,861,000	4,861,000	SBM
TJ	Jasa Pemeliharaan/Annual Technical Support (ATS)			104,762,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.019-JAKARTAII)			104,762,000	RM
	- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	73.0 UNIT	686,000	50,078,000	SBM
	- Pemeliharaan Scanner	8.0 UNIT	343,000	2,744,000	
	- Pemeliharaan Printer	30.0 UNIT	588,000	17,640,000	SBM
	- Pemeliharaan Jaringan LAN	1.0 THN	34,300,000	34,300,000	
4701.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal(Base Line) Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT	18.0 Unit, m2, Paket		63,200,000	
4701.EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	18.0 Unit		63,200,000	
100	Tidak Ada Komponen			63,200,000	U
A	Peralatan dan Mesin			63,200,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.019-JAKARTAII)			63,200,000	PNP
	- Meja Rapat Auction Room	2.0 UNIT	9,100,000	18,200,000	
	- Kursi Besi/Metal Auction Room	12.0 UNIT	2,650,000	31,800,000	
	- CCTV Auction Room	2.0 UNIT	1,100,000	2,200,000	
	- AC Split 1 PK Auction Room	2.0 UNIT	5,500,000	11,000,000	
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik			13,420,000	
4702.BMB	Komunikasi Publik(Program Baru - Perubahan Kebijakan) Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT	12.0 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume		13,420,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2026

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (09) Ditjen Kekayaan Negara
 UNIT KERJA (537721) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
 ALOKASI Rp. 2,805,548,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2026			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4702.BMB.002	Kehumasan	12.0 kegiatan		13,420,000	
100	Tidak Ada Komponen			13,420,000	U
A	Bimbingan Teknis/FGD/Sosialisasi di Bidang Publikasi			6,350,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.019-JAKARTAI)			3,240,000	RM
	- KDM - Makan Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 1 FREK]	40.0 OK	57,000	2,280,000	SBM
	- KDM - Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA [40 ORG x 1 FREK]	40.0 OK	24,000	960,000	SBM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.019-JAKARTAI)			3,110,000	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [1 ORG x 3 HR x 1 FREK]	3.0 OH	430,000	1,290,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) [2 ORG x 1 HR x 1 FREK]	2.0 OH	735,000	1,470,000	SBM
	- Transportasi [1 ORG x 1 FREK]	1.0 OK	350,000	350,000	
B	Peliputan Berita Mengenai Kegiatan DJKN			7,070,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.019-JAKARTAI)			6,050,000	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [2 ORG x 1 HR x 5 FREK]	10.0 OH	430,000	4,300,000	SBM
	- Transportasi [1 ORG x 5 FREK]	5.0 OK	350,000	1,750,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.019-JAKARTAI)			1,020,000	RM
	- Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [1 ORG x 1 HR x 6 FREK]	6.0 OK	170,000	1,020,000	SBM
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal			12,635,000	
4704.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Program Baru - Perubahan Kebijakan)	5.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		12,635,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT				
4704.EBD.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5.0 Dokumen		12,635,000	
100	Tidak Ada Komponen			12,635,000	U
A	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Manajemen Risiko dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			12,635,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.019-JAKARTAI)			5,835,000	RM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) [2 ORG x 1 HARI x 3 FREK]	6.0 OH	430,000	2,580,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (JAWA BARAT) [1 ORG x 1 HR x 3 FREK]	3.0 OH	735,000	2,205,000	SBM
	- Transportasi [1 ORG x 3 FREK]	3.0 OK	350,000	1,050,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.019-JAKARTAI)			6,800,000	RM
	- Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [2 ORG x 1 HARI x 20 FREK]	40.0 OK	170,000	6,800,000	SBM

JAKARTA, 5 Januari 2026

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

ROFII EDY PURNOMO
 NIP 197104101997031003